

## ABSTRAK

Penulisan disertasi ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi keaktifan hakim (*judicial activism*) melalui penemuan hukum progresif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*. Penelitian *doctrinal* dilaksanakan dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian *non doctrinal* dilaksanakan dengan wawancara dan observasi.

Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan teori dari berbagai perspektif aliran yaitu *realisme* karena *judicial activism* mengkonsepkan hakim tidak hanya menemukan dan menerapkan hukum namun juga membuat hukum atau *judge made law*. *Sociological jurisprudence* digunakan untuk menganalisis bahwa hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Behavioral Jurisprudence* digunakan karena pelaksanaan *judicial activism* sangat tergantung pada pribadi hakim. *Critical legal studies* digunakan karena hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik dan hukum tidaklah netral serta bebas nilai.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendasarkan pada wawancara, observasi dan studi pustaka maka keaktifan hakim (*judicial activism*) belum maksimal digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Hal ini dikarenakan penggunaan yurisprudensi tanpa sikap hati-hati atau *reserve*, kecenderungan hakim menggunakan cara berpikir parsial, pragmatis dan jalan pintas, Hakim tidak memaksimalkan asas hakim aktif, Hakim sering mengeluarkan putusan dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Keaktifan hakim (*judicial activism*) Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penemuan hukum progresif diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dikarenakan : Tugas dan wewenang hakim menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adanya peran hakim yang aktif atau *dominus litis*, Hakim mencari kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil dan putusan hakim bersifat *erga omnes*.

Membangun keaktifan hakim (*judicial activism*) dilakukan dengan mengubah, mengganti, memperbaiki pengambilan putusan hakim yang kaku (*judicial restraint*) menjadi pengambilan putusan yang mencerminkan keaktifan hakim (*judicial activism*). Langkah-langkah yang dilakukan melalui pola rekrutmen hakim yang berkualitas, pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dan pelatihan hakim yang berkelanjutan, peningkatan moralitas hakim melalui budaya hukum hakim "*judicial culture*", meningkatkan kerjasama lembaga peradilan dengan perguruan tinggi. Implementasi pengambilan putusan *judicial activism* dalam praktik dan tugas hakim, yaitu hakim menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas, hakim mengoptimalkan penemuan hukum progresif, membentuk karakter hakim progresif, dan keberanian hakim mengambil putusan.

Kata kunci : *Judicial Activism*, penemuan hukum progresif, sengketa tata usaha negara

## **ABSTRACT**

This dissertation aims to analyze and evaluate judicial activism through progressive law discovery in resolving state administrative disputes to be applied and implemented in practice and judge duties.

This is a judicial study conducted by doctrinal and non-doctrinal design. The doctrinal study was conducted by searching for the theoretical review related to the problem formulation. The non-doctrinal was conducted by interview and observation. To answer the problems, the research used realism theory since basically the judicial activism is when the judge made law (not only finding but also applying the law). The theory of sociological jurisprudence is applied to analyze that the judge should dig, follow, and comprehend the law values and the justice in society. Behavioral Jurisprudence is applied because the judicial jurisprudence depends on the judge himself. The theory of critical legal studies is applied because law cannot be neutral and free from value.

Based on the interview, observation, and literature study, the findings show that judicial activism has not fully been applied in the resolution process of state administrative dispute . It is because the use of jurisprudence is applied inadvertently or reverse, the judge's tendency to apply partial and pragmatic way of thinking, and shortcut. The Judge of does not maximize the principle of active judge, The Judge of Administrative Court often issues unaccepted verdict.

The judicial activism through progressive law discovery is absolutely required in the resolution process of state administrative dispute because: The duties and authority of the judge of Administrative Court are accepting, observing, and resolving the arbitrary, the active role of judge, the judge of Administrative Court search for the material truth not formal truth, the verdict of judge of Administrative Court should be *erga omnes*.

Building the judicial activism is done by changing, substituting, and improving the judicial restraint. The steps done are by applying a qualified recruitment system, a high quality of law education and continuing judge training, judges' moral improvement through judicial culture, improve the cooperation between judicial institutions and universities. The verdict implementation of judicial activism in practice and the judge duties are producing the qualified verdict, optimizing progressive law discovery, building progressive character of judge, judge's brave to verdict.

Keywords: Judicial activism, progressive law discovery, state administrative dispute.